

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, A. N., & Zahara, E. L. (2018). *Dana Kelurahan Dan Tantangannya*.
Www.Puskajianggaran.DPR.go.id
- Angka, A., Ismail, I., & Herlina, B. (2022). Implementasi Kebijakan Pengalihan Dana Kelurahan Menjadi Dana Penanggulangan COVID-19 Di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau : Public Administration*, 3(2), 1154–1168. <https://Ojs.Univprima.Ac.Id/Index.Php/Jangpa>
- Faradila, M., & Lutfi, A. (2020). Analisis Desain Kebijakan Alokasi Bantuan Dana Kelurahan Tahun 2019. *Jurnal Public Policy*, 6(2), 75.
<https://doi.org/10.35308/Jpp.V6i2.1762>
- Fazhurrahman. (2022). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pemanfaatan Dana Kelurahan Di Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 8(3), 324–333.
<https://doi.org/10.21776/Ub.Jiap.2022.008.03.9>
- Hariadin, & Rais, M. (2022). Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari Kota Baubau. *Entries : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UM Buton*, 4(2), 2747–2779.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy Policy Cycles And Policy Subsystems* (2nd Ed., Vol. 2). Exford University Press.
- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia* (1st Ed., Vol. 1). CV. Dharma Persada.
- Kementerian Hukum Dan Ham. (2021). *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Ruu Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
www.BPHN.go.id
- KPPOD. (2021). *Dana Transfer Ke Daerah Dalam Ruu Hkpd*.
- Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Modul Iv : Analisis Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Negara RI.
- Mahatma Chrysna. (2022, June 15). *Dana Kelurahan : Sejarah Dan Perkembangannya*. Litbang Kompas.
- Malawat, S. H. (2022). *Pengantar Administrasi Publik* (A. Pardede, Ed.; 1st Ed., Vol. 1). Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Mayer, I. S., Van Daalen, C. E., & Bots, P. W. G. (2004). Perspectives On Policy Analyses: A Framework For Understanding And Design. In *International Journal Of Technology, Policy And Management* (Vol. 4, Issue 2, Pp. 169–191). Inderscience Publishers. <https://doi.org/10.1504/IJTPM.2004.004819>

- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik* (Pertama, Vol. 1). Leutikaprio.
- Nurulita, E., & Trisnainingsih, S. (2022). Kebijakan Pemanfaatan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 19133–19157. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V7i12.10474>
- Okparizan, & Septian, D. (2017). Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 51–72.
- Parawangsyah, A., Thaha, R., & Arifin, I. (2021). Analisis Institusionalisasi Kebijakan Dana Kelurahan Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *SEIKO : Journal Of Management & Business*, 4(1), 35. <https://doi.org/10.37531/Sejaman.V4i1.861>
- Peters, B. G. (2018). *Policy Problems And Policy Design*. Edward Elgar Publishing, Inc. <https://doi.org/10.4337/9781786431356>
- Peters, G., & Fontaine, G. (2021). *Introduction To The Research Handbook Of Policy Design Operationalizing The Policy Design Framework* (2022nd Ed., Vol. 2022). Edwar Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781839106606.00008>
- Rauf, R. (2017). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 221–232. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1810>
- Rauf, R. (2018a). *ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantuan): Vol. I* (S. Maulidiah, Ed.; I). Zanafa Publishing.
- Rauf, R. (2018b). *ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (DEKONSENTRASI, DESENTRALISASI, DAN TUGAS PEMBANTUNYA)* (S. Maulidiah, Ed.; I). Zanafa Publishing.
- Setiabudhi, R., Andreas, P., Kartika, P., Astariyani, G., Dewi, A., Yudharta, D., & Winaya, K. (2017). *Keberadaan Kelurahan Dalam Perspektif UU Desa*.
- Setiyono, B. (2016). *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi* (III). Nuansa Cendekiia.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (1st Ed., Vol. 1). CV. Alfabeta.
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik Dan Good Governency*.
- Tomy Risqi. (2015, March 24). *Nasib Kelurahan Pasca UU Pemda*.
- Warta.Jogjakota.Go.Id. (2018, April 18). *Apeksi Ingin Kota Dapatkan Dana Kelurahan*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan